DISPORA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2025

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta berkah-Nya kepada kita sehingga diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik di Indonesia.

Dalam memenuhi amanat tersebut, informasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perjalanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditemukan juga kendala serta hambatan, namun semuanya menjadi sebuah tantangan yang melahirkan kreativitas bagi kami untuk menjadi semakin baik.

Palembang, 19 Agustus 2026
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. M. Alfairi Zabidi, S.Pd, M.Pd.I, MM
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP.196911061993031002

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	
Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	
Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
Kasubag PEP	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iii**
DAFTAR GRAFIK		**iv**
GAMBAR		**v**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	6
	C. Keadaan Pegawai	11
	D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	20
	E. Landasan Hukum	21
	F. Maksud dan Tujuan	22
	G. Sistematika Penyajian	23
BAB II	**PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA**	**25**
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	25
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Dasar (IKD)	26
	C. Perjanjian Kinerja	28
	D. Rencana Anggaran Tahun 2025	29
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	30
	A. Capaian Kinerja Tahun 2025	30
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
	C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	58
BAB IV	**PENUTUP**	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Langkah Tindak Lanjut	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.4	Rekapitulasi Kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab)	12
Tabel 1.5	Aset yang Dikelola	15
Tabel 1.6	Daftar Aset Barang Tidak Begerak	16
Tabel1.7	Daftar Aset Barang Begerak	16
Tabel 2.1	Tabel Indikator Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026	26
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026	26
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Dasar (IKD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 2.6	Belanja Tahun 2025	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Wirausaha Muda	31
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pemuda yang Berperan Serta Dalam Pembangunan	34
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang Berperan Dalam Pembangunan	36
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	40
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Medali Yang Diperoleh Dari Kejuaraan Nasional dan Internasional	44
Tabel 3.8	Perolehan Medali Internasional dan Nasional Dispora Tahun 2025	46
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pembinaan Atlet Muda	47
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	50
Tabel 3.11	Perbandingan Nilai IPP Nasional dan Provinsi	52
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) / Sport Development Index (SDI)	53
Tabel 3.13	Hasil IPO Nasional dan IPO Provinsi Sumatera Selatan	55
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Wirausaha Muda	32
Grafik 3.2	Perbandingan Target & Realisasi Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	37
Grafik 3.3	Perbandingan Antara Target & Realisasi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga Tahun 2025	41
Grafik 3.4	Perbandingan Antara Target & Realisasi Jumlah Medali Yang Diperoleh Dari Kejuaraan Nasional dan Internasional Tahun 2025	44
Grafik 3.5	Perbandingan Antara Target & Realisasi Jumlah Pembinaan Atlet Muda 2024	48
Grafik 3.6	Perbandingan IPP Provinsi Sumatera Selatan	50
Grafik 3.7	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	54
Grafik 3.8	Perbandingan IPO Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan	55

GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Jabatan pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	10
Gambar 3.1	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Optimasi Digital Marketing Tahun 2025	33
Gambar 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 2025	35
Gambar 3.3	Kegiatan Community Festival, Duta Pora dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2025	35
Gambar 3.4	Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	39
Gambar 3.5	Kegiatan Pelajar dan Masyarakat Sumsel Bugar Dispora Prov. Sumsel Tahun 2025	42
Gambar 3.6	Kegiatan Seleksi Penerimaan Atlet SPOBNAS Cabor Taekwondo Dispora Prov. Sumsel Tahun 2025	44
Gambar 3.7	Framework Pembangunan Pemuda	52
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Olahraga Sumsel Tahun 2025	56

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai pedoman dan acuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan serta subkegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kewenangan provinsi. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dan tahunan dalam jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini,rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya, untuk program-program pembangunan yang terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan dituangkan secara lebih detail ke dalam Rencana Strategis OPD yang menangani, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Stratejik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kondisi realisasi kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka pendek. Dokumen ini menyediakan dasar bagi core business organisasi secara sustainable untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

1. Telaah Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajeman kepemerintahan.

Arah Pembangunan tahap pertama dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi :

1. Sumsel sebagai Provinsi yang Maju Ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantra. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
2. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Petumbuhan Ekonomi yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata Kelola yang baik

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatan pendapatan masyarakat
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi dan hasil yang lebih spesifik. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi menggunakan indikator kuantitatif yang relevan. Penetapan indikator dilakukan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada Rencana Kerja 2025, penetapan sasaran dan tujuan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Penetapan tujuan dan sasaran juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

A.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada Rencana Strategis adalah “Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga”. Tujuan tersebut, didukung dengan 2 (dua) Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Pemuda

   Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 Tahun yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain yang dimulai dengan Pembangunan Individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan dan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

   Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

2. Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

   SDI merupakan strategi yang esensial dan efektif untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan keolahragaan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia. Fungsi SDI menurut Permenpora RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga adalah:

   a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
   b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
   c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
   d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

SDI sebagaimana meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:

a) sumber daya manusia olahraga;
b) ruang terbuka;
c) literasi fisik;
d) partisipasi;
e) kebugaran;
f) perkembangan personal;
g) kesehatan;
h) ekonomi; dan
i) performa.

A.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, telah disusun sasaran yang akan dicapai yaitu:

Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Pemuda

Sasaran : 1. Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri;

2. Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda;

3. Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan

Tujuan 2 : Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

Sasaran : 1. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga;

2. Peningkatan Prestasi Olahraga;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, yaitu :

Tugas Pokok

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Fungsi

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas pemuda dan olahraga prov. sumsel;

d. Melaksanakan bimbingan teknis dan melakukan supervise atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

e. Mengkoordinasikan, melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;

f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

g. Sementara untuk mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh lima orang pejabat eselon III dan lima belas pejabat eselon IV, yaitu :

A. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

a. Mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja;
c. Melakukan pembinaan dan memberikan layanan administrasi pemerintah;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Sekretaris sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

c. Kasubbag Keuangan

B. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Fungsi

a. Merumuskan kebijakan;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ

b. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

c. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda

C. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

Fungsi

a. Merumuskan kebijakan;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

b. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

c. Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda

D. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Fungsi

a. Merumuskan kebijakan;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.9
Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

b. Kasi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus

c. Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek

olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri olahraga

dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Fungsi

a. Merumuskan kebijakan;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi

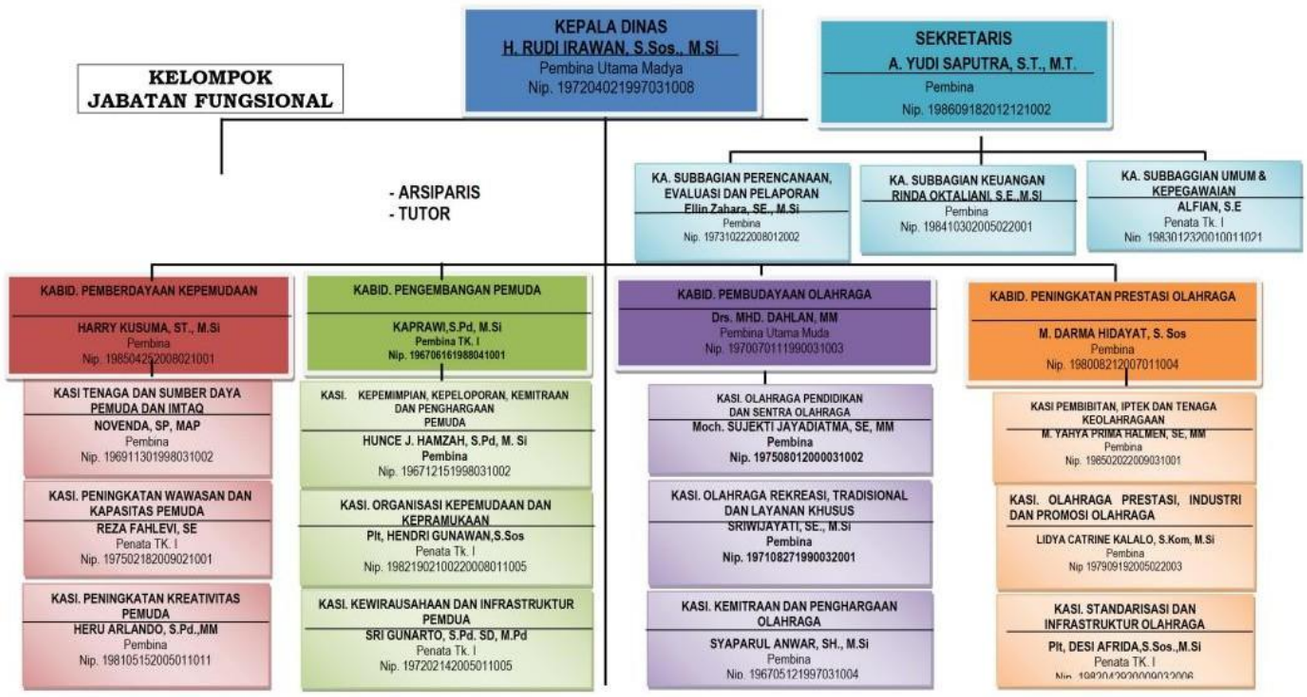
Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

b. Kasi Olahraga, Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga

c. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai bidang tugasnya masing-masing dan digambarkan dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 1.0 Bagan Struktur Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025

C. Keadaan Pegawai

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari sekretariat dan 4 bidang yang masing-masing membawahi 3 seksi atau subbagian. Jumlah total pegawai sebanyak 172 orang yang terdiri dari 59 orang ASN, 108 orang PPPK, dan 5 orang PPPK Paruh Waktu pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
SD	2	-	2
SMA	46	15	61
S2	10	11	21
S1	42	34	76
D3	5	6	11
S3	1	-	1
Grand Total	**106**	**66**	**172**

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
II/a	1	-	0
II/b	2	-	0
II/c	3	-	4
II/d	5	2	3
III/a	5	-	6
III/b	5	1	10
III/c	5	8	7
III/d	4	9	21
IV/a	9	3	11
IV/b	8	-	1
IV/c	2	-	1
IV/d	2	-	1
Grand Total	**42**	**23**	**65**

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
PNS	37	22	65
PPPK	67	41	90
PPPK PARUH WAKTU	2	3	5
Grand Total	**106**	**66**	**172**

Komposisi Kebutuhan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan analisi jabatan, yaitu:

TABEL 1.4
REKAPITULASI KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Kelebihan/Kekurangan Pegawai	
			+	-
1	**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**	1	-	-
2	JF Pelatih Olahraga Ahli Madya	1	-	-
3	JF Pelatih Olahraga Ahli Muda	2	-	1
4	JF Arsiparis Muda	0	-	1
5	JF Perencana Ahli Madya	0	-	1
6	JF Perencana Ahli Muda	0	-	1
7	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	0	-	1
8	**Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga**	1	-	1
9	**Sub Bagian Perencana, Evaluasi dan Pelaporan**	1	-	-
10	Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	6
11	Pengelola Data dan Informasi	1	-	3
12	Pengadministrasi Perkantoran	4	-	3
13	Penata Layanan Operasional	2	-	4
14	Pengelola Layanan Operasional	2		2
15	JF Perencana Ahli Pertama	0	-	2
16	**Sub Bagian Keuangan**	1	-	-
17	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	7
18	Pengelola Data dan Informasi	0	-	10
19	Pengadministrasi Perkantoran	3	-	4
20	Penata Layanan Operasional	5	-	1
21	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4
22	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	1	-	-
23	Penelaah Teknis Kebijakan	4	-	10

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Kelebihan/Kekurangan Pegawai	
			+	-
24	Pengelola Data dan Informasi	3	-	17
25	Pengadministrasi Perkantoran	6	-	5
26	Operator Layanan Operasional	6	-	2
27	Pengelola Umum Operasional	2	-	0
28	Penata Layanan Operasional	2	-	4
29	Pengelola Layanan Operasional	0		5
30	JF Arsiparis Ahli Pertama	0	-	1
31	JF Arsiparis Penyelia	0	-	1
32	JF Arsiparis Mahir	0	-	1
33	JF Arsiparis Terampil	0	-	1
34	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	-	1
35	**Bidang Pengembangan Pemuda**	1	-	-
36	**Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan**	1	-	-
37	Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	3
38	Pengelola Data dan Informasi	0	-	2
39	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	3
40	Penata Layanan Operasional	3	-	1
41	Pengelola Layanan Operasional	1	-	3
42	**Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda**	1	-	-
43	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
44	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
45	Pengadministrasi Perkantoran	0	-	4
46	Penata Layanan Operasional	1	-	2
47	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4
48	**Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda**	1	-	-
49	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
50	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
51	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	2
52	Penata Layanan Operasional	2	-	2
53	Pengelola Layanan Operasional	0	-	5
54	**Bidang Pemberdayaan Pemuda**	1	-	-
55	**Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda**	1	-	-
56	Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	2
57	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
58	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	4
59	Penata Layanan Operasional	1	-	3
60	Pengelola Layanan Operasional	1	-	3
61	**Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda**	1	-	-
62	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
63	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
64	Pengadministrasi Perkantoran	3	-	2
65	Penata Layanan Operasional	3	-	1
66	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Kelebihan/Kekurangan Pegawai	
			+	-
67	**Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ**	1	-	-
68	Penelaah Teknis Kebijakan	3	-	1
69	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
70	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	3
71	Penata Layanan Operasional	1	-	2
72	Pengelola Layanan Operasional	0	-	3
73	**Bidang Pembudayaan Olahraga**	1	-	-
74	**Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**	1	-	-
75	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
76	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
77	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	3
78	Operator Layanan Operasional	1	-	3
79	Penata Layanan Operasional	2	-	2
80	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4
81	JF Asisten Pelatih Olahraga Pemula	1	-	-
82	JF Asisten Pelatih Olahraga Mahir	3	-	-
83	**Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**	1	-	-
84	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	2
85	Pengelola Data dan Informasi	0	-	2
86	Pengelola Layanan Operasional	1	-	3
87	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	3
88	Penata Layanan Operasional	3		1
89	**Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus**	1	-	-
90	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
91	Pengelola Data dan Informasi	0	-	3
92	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	2
93	Penata Layanan Operasional	1	-	2
94	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4
95	**Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**	1	-	-
96	**Seksi Olahraga Prestasi, Industri, dan Promosi Olahraga**	1	-	-
97	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
98	Pengelola Data dan Informasi	0	-	2
99	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	2
100	Penata Layanan Operasional	3	-	1
101	Pengelola Layanan Operasional	0	-	4
102	**Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Olahraga**	1	-	-
103	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	3
104	Pengelola Data dan Informasi	0	-	2
105	Operator Layanan Operasional	1	-	3
106	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	3
107	Penata Layanan Operasional	1	-	3
108	Pengelola Layanan Operasional	1	-	2

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Kelebihan/Kekurangan Pegawai	
			+	-
109	**Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**	1	-	-
110	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	4
111	Pengelola Layanan Operasional	0	-	6
112	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	3
113	Penata Layanan Operasional	2	-	2
	Jumlah	**134**		**267**

Adapun hasil rekonsiliasi BMD dibuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai rekap aset per (30-06-2026). Untuk penjelasan lebih lanjut, guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengelola aset-aset berupa bangunan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yakni :

TABEL 1.5
ASET YANG DIKELOLA

No	Uraian		Nilai Aset
1.	Tanah	Rp.	103.419.013.200
2.	Peralatan dan Mesin	Rp.	22.644.003.700
3.	Bangunan Gedung	Rp.	146.564.798.653
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	1.649.203.121
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	5.186.126.218
6.	Aset Lainnya (tidak berwujud)	Rp.	149.300.000
7.	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp.	199.671.000
8.	Ekstrakompetable	Rp.	1.328.371.586
	TOTAL	Rp.	281.140.487.480

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025

Komposisi Daftar Aset Tidak Bergerak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) per 30 Juni 2025 :

TABEL 1.6
Daftar Aset Barang Tidak Bergerak

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Ket.
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.820,00	2002	Jl. Aerobik No. 03 Palembang	Sk Gub.Sumsel No.026/SK/IX/2001
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	33.526,00	2006	Jl. POM Kel. Lorok Pakjo Palembang	Komplek Stadion Sriwijaya
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.575,00	2013	Jl. Jend. Sudirman No. 1048 Palembang	Eks. Kantor Dinas Pertambangan dan Energi

TABEL 1.7
Daftar Aset Barang Bergerak

Komposisi Daftar Aset Bergerak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) per 30 Juni 2025 :

No.	Nama	Banyak	Keterangan
1	Mesin Proses apung lainnya	1 unit	
2	Pompa Air	1 unit	
3	Micro Bus	2 Unit	
4	Mini Bus	10 Unit	
5	Pick Up	3 Unit	
6	Kendaraan Roda Tiga	1 unit	
7	Sepeda Motor	24 Unit	
8	Trolly Electric	1 Unit	
9	Gerobak Dorong	2 Unit	
10	Kapal Motor	2 Unit	
11	Mesin Bor	3 Unit	
12	mesin Kompresor	1 unit	
13	Mesin Las Listrik	1 unit	
14	Mesin Gerinda Tangan	1 unit	
15	Mesin Ampelas Tangan	1 unit	
16	Mesin Gergaji Besi	2 Unit	
17	Motor Listrik	1 unit	
18	Gergaji Chain Saw	1 unit	
19	Mesin Gerinda tangan Listrik	1 unit	
20	Grating Generator Unit	1 unit	
21	Termometer Standar	2 Unit	
22	Jam Ukur (Meet Lock)	1 unit	
23	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5 unit	
24	Oven	1 unit	
25	Rak-Rak Penyimpan	2 Unit	
26	Lemari Penyimpan	2 Unit	
27	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1 unit	
28	Lemari Besi/Metal	2 Unit	
29	Rak Besi	1 unit	

No.	Nama	Banyak	Keterangan
30	Rak Kayu	2 Unit	
31	Filing Cabinet Besi	10 Unit	
32	Locker	3 Unit	
33	Lemari Kaca	1 unit	
34	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	4 unit	
35	CCTV - Camera Control Television System	3 Unit	
36	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	
37	Mesin Absensi	1 unit	
38	LCD Projector/Infocus	4 unit	
39	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	
40	Alat Sidik Jari	1 unit	
41	Papan Pengumuman	1 unit	
42	Meja Kerja Kayu	3 Unit	
43	Kursi Besi/Metal	8 unit	
44	Bangku Panjang Besi/Metal	2 Unit	
45	Meja Rapat	6 Unit	
46	Tempat Tidur Besi	2 Unit	
47	Tempat Tidur Kayu	4 Unit	
48	Meja Tambahan	1 unit	
49	Meja Panjang	3 Unit	
50	Meja Bundar	3 Unit	
51	Meja 1/2 Biro	2 Unit	
52	Kursi Fiber Glas/Plastik	8 Unit	
53	Kursi Rapat	4 unit	
54	Kursi Tamu	3 Unit	
55	Kursi Putar	5 unit	
56	Bangku Tunggu	2 Unit	
57	Kursi Lipat	5 unit	
58	Pot Bunga	1 unit	
59	Sofa	8 Unit	
60	Meubeleur lainnya	10 Unit	
61	Alat Pengukur Waktu lainnya	1 unit	
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	
63	Mesin Pemotong Rumput	7 unit	
64	Mesin Cuci	1 unit	
65	Alat Pembersih lainnya	2 Unit	
66	Lemari Es	3 Unit	
67	A.C. Split	18 Unit	
68	Alat Pendingin lainnya	1 unit	
69	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 unit	
70	Tabung Gas	2 Unit	
71	Mixer	1 unit	
72	Alat Dapur lainnya	12 Unit	
73	Televisi	8 unit	
74	Amplifier	2 unit	
75	Loudspeaker	6 Unit	
76	Sound System	3 Unit	
77	Wireless	2 Unit	
78	Megaphone	1 unit	

No.	Nama	Banyak	Keterangan
79	Microphone	5 unit	
80	Unit Power Supply	4 unit	
81	Camera Video	4 unit	
82	Alat Hiasan	2 Unit	
83	Tiang Bendera	1 unit	
84	Seterika	1 unit	
85	Dispenser	3 Unit	
86	Handy Cam	1 unit	
87	Karpet	3 Unit	
88	Vertikal Blind	13 Unit	
89	Alat Pemanas Ruangan	2 Unit	
90	Lampu	3 Unit	
91	Bracket Standing Peralatan	1 unit	
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	13 Unit	
93	Pompa Kebakaran/Portable	1 unit	
94	Alat Pembantu Kebakaran	1 unit	
95	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1 unit	
96	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	
97	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	
98	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2 Unit	
99	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7 unit	
100	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 unit	
101	Meja Tamu Biasa	3 Unit	
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	
105	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6 Unit	
106	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2 Unit	
107	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	
108	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	13 Unit	
109	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1 unit	
110	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Unit	
111	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4 unit	
112	Audio Mixing Portable	2 Unit	
113	Audio Monitor Active	1 unit	
114	Audio Monitor Passive	1 unit	
115	Microphone/Wireless MIC	6 Unit	
116	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 Unit	
117	Digital Audio Storage System	1 unit	
118	Cable	3 Unit	
119	peralatan studio audio lainnya (dst)	1 unit	
120	Camera Electronic	3 Unit	
121	Video Switcher	1 unit	
122	Camera Wall Box	1 unit	
123	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1 unit	
124	Rak Peralatan	1 unit	
125	Tripod Camera	1 unit	
126	Camera Film	1 unit	
127	Lensa Kamera	2 Unit	
128	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	4 unit	

No.	Nama	Banyak	Keterangan
129	Head Set	1 unit	
130	Camera Digital	4 unit	
131	Video Conference	1 unit	
132	Video Splitter	1 unit	
133	Camera Conference	1 unit	
134	Alat Studio Video Lainnya	1 unit	
135	Mesin Jilid	1 unit	
136	Alat Studio Lainnya	11 Unit	
137	Telephone (PABX)	1 unit	
138	Telephone Mobile	2 Unit	
139	Handy Talky (HT)	3 Unit	
140	Facsimile	1 unit	
141	Audio Monitor	1 unit	
142	peralatan komunikasi navigasi lainnya lainnya (dst)	2 Unit	
143	Alat Kedokteran umum lainnya	1 unit	
144	Sendok Cetak	1 unit	
145	Sepeda Statis	1 unit	
146	Alat Kesehatan olahraga lainnya	42 unit	
147	Jack CBR	1 unit	
148	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	1 unit	
149	S C R E E N	2 Unit	
150	PC-Based UV Gel Documentation System	1 unit	
151	Precission Filling Machine	1 unit	
152	Mesin Printing	1 unit	
153	Mesin Pemotong Serat	1 unit	
154	Hammer Mill (Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik)	1 unit	
155	Pompa Airasil	1 unit	
156	Alat Selam	9 Unit	
157	Mangkok Porselin	4 unit	
158	Meja Kerja	2 Unit	
159	Papan Panel	2 Unit	
160	Bola Gelinding	3 Unit	
161	Layar	1 unit	
162	Papan Peraga	1 unit	
163	Panci	1 unit	
164	Refrigerator/Freezer	1 unit	
165	P.C Unit	16 Unit	
166	Lap Top	14 Unit	
167	Note Book	4 unit	
168	Tablet PC	5 unit	
169	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1 unit	
170	Monitor	2 Unit	
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24 Unit	
172	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	
173	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	
174	External/ Portable Hardisk	1 unit	
175	Peralatan Personal Komputer lainnya	3 Unit	
176	Server	1 unit	
177	Peralatan Jaringan lainnya	3 Unit	
178	Treadmill	3 Unit	
179	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	23 unit	

D. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Aspek strategis keberadaan organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperolehdan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara permasalahan-permasalahan (Strategic Issued) yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/Dispora Prov Sumsel.

1.b Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

1.c Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber–sumber pendapatan daerah.

1.d Belum optimalnya penerapan dan evaluasi dengan program berdasarkanstandar yang telah ditetapkan. Standarisasi di Dispora Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.

2. Permasalahan Eksternal

2.a Keterbatasan Dukungan Sarana dan Prasarana Olahraga di Daerah Sebagian kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih memiliki keterbatasan fasilitas olahraga yang memenuhi standar pembinaan prestasi. Banyak sarana olahraga yang belum terpelihara dengan baik atau belum memenuhi standar nasional maupun internasional. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang pembinaan atlet usia dini serta penyelenggaraan kompetisi yang berkualitas. Ketimpangan fasilitas antar wilayah juga menyebabkan akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga tidak merata.

2.b Rendahnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan yang ProduktifPerubahan pola hidup generasi muda, pengaruh digitalisasi, serta meningkatnya aktivitas berbasis teknologi menyebabkan sebagian pemuda kurang terlibat dalam kegiatan kepemudaan seperti organisasi pemuda, kewirausahaan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya peran pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan daerah.

2.c Perubahan Kondisi Ekonomi dan Prioritas AnggaranKondisi ekonomi nasional maupun daerah dapat mempengaruhi prioritas anggaran pemerintah daerah. Ketika terjadi penyesuaian anggaran, program kepemudaan dan olahraga sering menghadapi keterbatasan pendanaan untuk pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, serta pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan.

2.d Terbatasnya Sinergi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Pengembangan kepemudaan dan olahraga tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan sinergi dengan sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga sektor swasta. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor sering belum optimal sehingga program pembinaan pemuda dan olahraga belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

E. Landasan Hukum

1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

F. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan good government karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik, dan dapat di pertanggung jawabkan;
2. Sebagai monitoring dan evaluasi secara perodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah terhadap target yang telah ditetapkan dalam cascading dokumen Renstra tahun 2025-2029;

3. Sebagai early warning, atas hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya;
4. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) dengan instansi pemerintah;
5. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab critical success factor.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Uraian maksud diatas menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan serta sub kegiatan sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada tahun 2025. Sementara tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu penyusunan LKjIP juga mengacu dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagaiberikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan perencanaan program sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas dengan Gubernur, Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas, Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III serta Staf dengan Pejabat Eselon IV.

BAB. lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun berjalan sampai dengan Tahun 2025 yang memuat persentase capaian target kinerja terhadap Penetapan Kinerja, setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target dan atau belum terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertanggung jawabkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur.

BAB. IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut di atas, agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga secara sistematis, sehinga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya pihak yang berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi terhadap program-program dinas.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga selama lima tahun. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta indikator kinerja yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang terukur sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran strategis Tahun 2025–2029 menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebagai acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi.

Adapun pemetaan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Indikator Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	***2***	***3***
Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rasio Wirausaha Pemuda
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;
	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi	Indeks Partisipasi Olahraga
		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
		Nilai Sakip Perangkat Daerah
		Persentase ketersediaan Laporan Keuangan yang Audited

Melalui pemetaan sasaran strategis tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga. Setiap tujuan diterjemahkan ke dalam sasaran yang spesifik dan diukur menggunakan indikator kinerja yang terukur sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan potensi pemuda, serta mendorong peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Dasar (IKD)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai revisi RPD 2024-2026

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan 2025- 2026

No	**Indikator**	**BASELINE 2024**	**Target Capaian setiap Tahun**			**Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD**
			2026	2027	2028	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Pembangunan Pemuda	54	56,8	58,33	59,78	55
2	Sport Development Index (SDI)	0,305	0,331	0,383	0,409	0,42

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2024- 2026

No	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD**	**Target Capaian setiap Tahun**			**Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD**
			2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Angka pertumbuhan wirausaha muda	40	40,5	40,75	41	41
2	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	36,67	40	45	47,75	47,75
3	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	2.295	4.000	4.500	5.000	13.500

4	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	26	30	35	41	41
5	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	100	180	130	130	440
6	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	262	265	270	275	275

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Dasar (IKD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2024- 2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.	Indeks Pembangunan Pemuda	50	52,5	55	54	0	0
02.	Sport Development Index (SDI)	0,4	0,4	0,42	0,305	0	0
03.	Angka pertumbuhan wirausaha muda	40,5	40,75	41	50	0	0
04.	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	40	45	47,75	40	0	0
05.	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	4000	4500	5000	34842	0	0
06.	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	30	35	41	25,2	0	0
07.	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	180	130	130	325	0	0
08.	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	265	270	275	219	0	0

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya perjanjian kinerja maka perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antar penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Dalam dokumen perjanjian kinerja juga memuat sasaran strategis, indikator kinerja dantarget kinerja serta program/kegiatan dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja tetap mengacu kepada rencana strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RKA/DPA (anggaran). Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Waktu
1	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Angka pertumbuhan wirausaha muda	%	40,75	TW4
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	45	TW4
3	Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	Orang	4.500	TW4
4	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	%	35	TW4
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	Medali	130	TW4
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Orang	35	TW4

D. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.112.694.701.958,- untuk pembiayaan 4 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Adapun rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 2.6. Belanja Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran
I. Belanja Operasi	**112.694.701.958**
a. Belanja Pegawai	11.696.471.485
b. Belanja Barang dan Jasa	70.615.538.078
c. Belanja Hibah	30.133.852.395
II. Belanja Modal	**248.840.000**
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.840.000
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
TOTAL	**248.840.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis seperti yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Penilaian dilakukan secara berkala baik secara manual lewat monitoring maupun, lewat website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET 2025	REALISASI 2025	
					JUMLAH	(%)
1	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Angka pertumbuhan wirausaha muda	%	40.75	30.00	73.61
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	40	55	137.50
3	Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	Org	5.000	1.829	36.58

4	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	%	41	21	51.21
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	Medali	130	171	180,56
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Org	275	296	82,64
7	Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	54		108,00
8	Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga	Sport Development Index (SDI)	Nilai Indeks	0,305		81,33

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran 1 : Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

B.1.1 Indikator : Angka pertumbuhan wirausah muda

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Angka pertumbuhan wirausaha muda

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Angka pertumbuhan Wirausaha Muda	%	40	40.75	30.00	73.62%

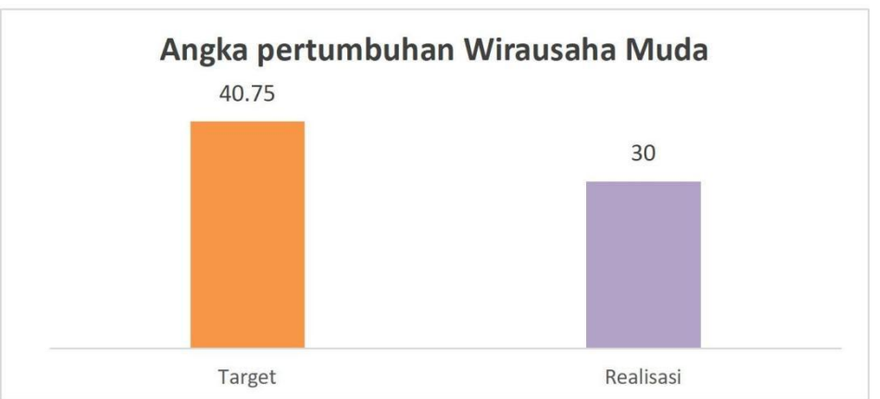
Dari sisi evaluasi kinerja, capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan wirausaha muda telah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa program seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi inkubasi usaha, serta pemberian akses jejaring usaha kepada pemuda telah berkontribusi dalam menumbuhkan minat dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan yang dicapai masih berada di bawah target yang direncanakan.

Adapun dari sisi analisis faktor yang mempengaruhi capaian, terdapat beberapa kemungkinan kendala, antara lain masih terbatasnya akses pemuda terhadap permodalan usaha, pendampingan bisnis yang berkelanjutan, serta akses pasar dan teknologi digital untuk

pengembangan usaha. Selain itu, sebagian pemuda masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajerial usaha, keberanian mengambil risiko, serta konsistensi dalam menjalankan usaha. Kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat juga dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha yang dirintis oleh pemuda.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan strategi pemberdayaan kewirausahaan pemuda, antara lain melalui peningkatan kualitas pelatihan kewirausahaan yang lebih aplikatif, penguatan program inkubasi bisnis pemuda, perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk pemuda. Dengan langkah tersebut diharapkan pada periode berikutnya angka pertumbuhan wirausaha muda dapat meningkat dan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal, sehingga partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri semakin kuat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

.



Grafik. 3.1 Perbandingan antara Target & Realisasi Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda 2025

Berdasarkan grafik Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda, terlihat bahwa target yang ditetapkan sebesar 40,75, sedangkan realisasi capaian sebesar 30. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara persentase, realisasi tersebut mencapai sekitar 73,6% dari target, sehingga masih terdapat selisih capaian sebesar 10,75 poin yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja.







Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Optimasi Digital Marketing Tahun 2025

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Optimasi Digital Marketing Tahun 2025 merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pemuda dengan pengetahuan serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam bidang pemasaran daring (digital marketing), sehingga mampu mengembangkan usaha secara lebih efektif dan berdaya saing.kegiatan pelatihan yang berlangsung di sebuah ruang pertemuan. Seorang narasumber sedang menyampaikan materi di podium kepada para peserta, sementara beberapa pemateri atau panitia lainnya duduk di meja depan sebagai bagian dari panel kegiatan. Di belakang narasumber tampak banner kegiatan bertuliskan “Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2025 – Digital Marketing”, yang menunjukkan fokus utama kegiatan yaitu penguatan kemampuan pemasaran digital bagi para wirausaha muda.

Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi pemanfaatan berbagai platform digital untuk promosi usaha, strategi pemasaran melalui media sosial, pengelolaan konten kreatif, serta optimalisasi marketplace dan teknologi digital lainnya dalam meningkatkan jangkauan pasar. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan para peserta dapat memasarkan produk atau jasa secara lebih luas, efektif, dan efisien.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda serta memperkuat peran generasi muda sebagai

penggerak perekonomian daerah di era digital.

B.2. Sasaran 2 : Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda

B.2.1 Indikator : Angka Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda

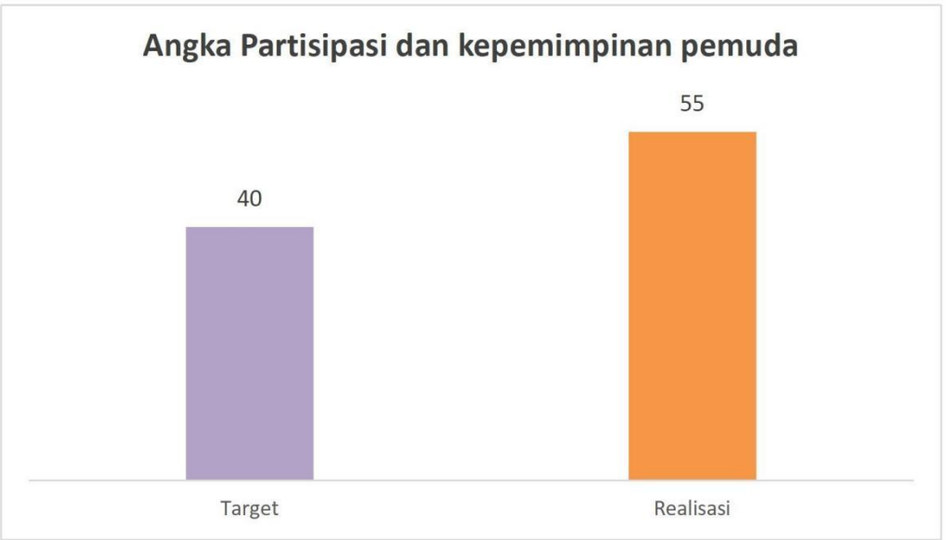
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	%	36,67	40	55	137,50%

Dari sisi penjelasan target indikator, angka target sebesar 40 ditetapkan sebagai ukuran kinerja untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan, organisasi kepemudaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program pengembangan kepemimpinan pemuda. Target ini disusun berdasarkan perencanaan program pembinaan kepemudaan yang meliputi kegiatan pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas organisasi pemuda, forum kepemudaan, serta fasilitasi partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Sementara itu, realisasi sebesar 55 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai kegiatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, kegiatan kepemimpinan, serta berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, adanya dukungan dari berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, komunitas pemuda, serta lembaga pendidikan turut berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya partisipasi aktif pemuda.

Dari hasil analisis capaian kinerja, keberhasilan melampaui target ini menunjukkan bahwa program pembinaan kepemimpinan pemuda berjalan secara efektif dalam meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan peran aktif pemuda dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Program seperti pelatihan kepemimpinan pemuda, kegiatan kepeloporan pemuda, penguatan organisasi kepemudaan, serta kegiatan pemberdayaan pemuda di berbagai bidang telah memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri sekaligus berkontribusi secara nyata dalam masyarakat. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan strategi pembinaan kepemudaan, seperti peningkatan kualitas program kepemimpinan, pengembangan jejaring organisasi pemuda, serta perluasan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan pemuda tidak

hanya berperan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga mampu menjadi penggerak, pelopor, dan pemimpin dalam berbagai bidang pembangunan.



Grafik. 3.2 Perbandingan antara Target & Realisasi Angka Partisipasi dan Kepimpinan Pemuda 2025

Berdasarkan grafik Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah 40, sedangkan realisasi capaian mencapai 55. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi aktif serta pembinaan inisiatif dan kepemimpinan pemuda telah berjalan dengan sangat baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Secara persentase, capaian kinerja tersebut mencapai sekitar 137,5% dari target, yang berarti terdapat selisih capaian sebesar 15 poin di atas target.



Gambar 3.3 Kegiatan Community *Festival,* Duta Pora dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2025

Community Festival merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wadah bagi para pemuda dan komunitas untuk mengekspresikan kreativitas, memperkuat jejaring, serta menampilkan berbagai potensi dan prestasi yang dimiliki generasi muda. Kegiatan ini biasanya menghadirkan berbagai rangkaian acara seperti pertunjukan seni, pameran karya kreatif, kompetisi, hingga pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi. Melalui kegiatan Community Festival, diharapkan tercipta ruang kolaborasi yang dapat mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan Community Festival yang dirangkaikan dengan ajang pemilihan Duta Pemuda/Duta PORA Sumatera Selatan Tahun 2025. Acara berlangsung di sebuah panggung utama dengan latar belakang banner kegiatan yang menampilkan tulisan “Duta PORA Sumatera Selatan 2025”. Para finalis tampak berdiri di atas panggung bersama panitia dan tamu undangan setelah melalui berbagai tahapan seleksi.

Dalam beberapa momen terlihat proses pengumuman pemenang, pemberian penghargaan, serta sesi foto bersama para finalis dan pemenang. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan apresiasi kepada pemuda yang memiliki kapasitas, kepemimpinan, serta kontribusi positif dalam bidang kepemudaan. Selain itu, ajang ini juga menjadi media promosi nilai-nilai kepemudaan seperti kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan semangat kolaborasi. Secara keseluruhan, kegiatan Community Festival yang ditampilkan pada gambar menggambarkan antusiasme dan partisipasi aktif para pemuda dalam kegiatan kepemudaan yang bersifat inspiratif dan kompetitif. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan figur-figur pemuda yang dapat menjadi teladan, motivator, serta agen perubahan bagi generasi muda lainnya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

B.3. Sasaran 3 : Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan

B.2.2 Indikator : Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	*org*	2.295	5.000	1.829	36.58%

Indikator jumlah pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah. Keterlibatan pemuda dan anggota Pramuka diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada tahun 2025, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan pemuda, penguatan peran organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, optimalisasi kegiatan yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kewirausahaan pemuda, serta kegiatan pembangunan berbasis komunitas juga perlu terus didorong. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan jumlah pemuda dan anggota Pramuka yang berperan aktif dalam pembangunan dapat meningkat secara bertahap sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 5.000 orang dapat tercapai secara lebih optimal.



Grafik. 3.2 Perbandingan antara Target & Realisasi Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan 2025

Berdasarkan data pada grafik, target yang ditetapkan sebesar 5.000 orang, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1.829 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 36,58 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dan anggota Pramuka dalam mendukung kegiatan pembangunan masih belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan di masa yang akan datang.

Selisih antara target dan realisasi yang masih cukup besar, yaitu 3.171 orang, mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program kepemudaan dan kepramukaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian tersebut antara lain terbatasnya pelaksanaan kegiatan yang secara langsung melibatkan pemuda dalam pembangunan, belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan organisasi kepemudaan serta gugus depan Pramuka, serta masih perlunya peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan di tingkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada tahun 2025, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan pemuda, penguatan peran organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, optimalisasi kegiatan yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kewirausahaan pemuda, serta kegiatan pembangunan berbasis komunitas juga perlu terus didorong.Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada periode berikutnya, khususnya menuju tahun 2025, diperlukan berbagai upaya strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, memperkuat peran organisasi kepemudaan dan gerakan Pramuka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, serta memperluas jangkauan program melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Selain itu, peningkatan sosialisasi program kepemudaan, pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, serta pengembangan program yang inovatif dan sesuai dengan minat generasi muda juga perlu dilakukan agar partisipasi pemuda dapat meningkat secara signifikan. Penguatan sistem pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas program yang dilaksanakan.

Dengan adanya berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan jumlah pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan dapat meningkat secara bertahap. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga target capaian sebanyak 5.000 orang pada tahun 2025 dapat tercapai secara lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Gambar 3.4 Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepramukaan, khususnya bagi para pembina, pelatih, serta pengelola kegiatan kepramukaan di tingkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pembinaan kepemudaan yang bertujuan untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, disiplin, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Workshop ini diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pengurus Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, pembina Pramuka, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan instansi terkait. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan kegiatan kepramukaan, penguatan program pembinaan anggota Pramuka, serta pengembangan metode pendidikan kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pelaksanaan Workshop Kepramukaan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kepramukaan di daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, forum workshop ini menjadi sarana koordinasi dan pertukaran pengalaman antar pengelola kegiatan kepramukaan guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembinaan generasi muda.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kegiatan Workshop Kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang

berkaitan dengan peningkatan peran pemuda dan anggota Pramuka dalam pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas pembina dan pengelola kegiatan kepramukaan, diharapkan pembinaan anggota Pramuka dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas pembinaan kepramukaan di Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatnya keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ke depan, hasil dari pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pembinaan kepramukaan yang lebih efektif, sehingga peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan karakter bagi generasi muda dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B.4. Sasaran 4 : Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga

Indikator : Angka Partisipasi masyarakat berolahraga

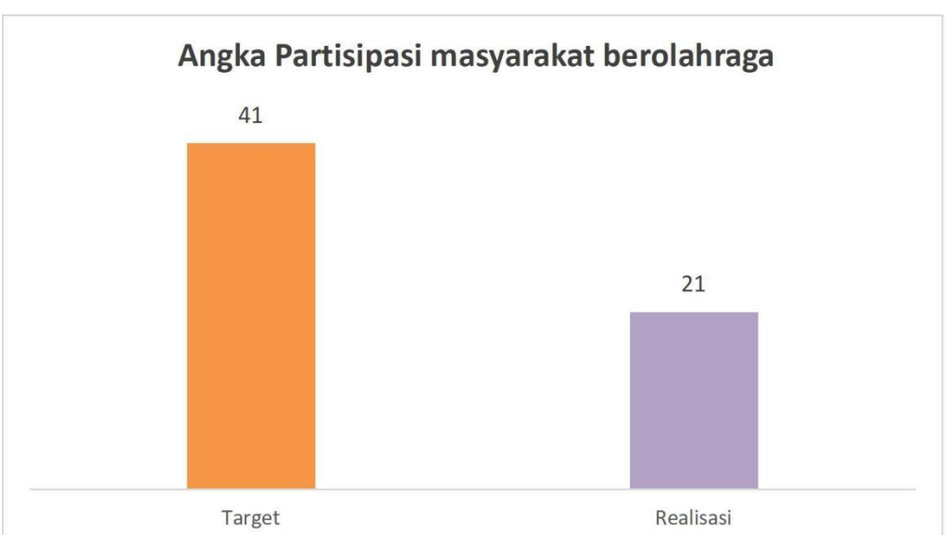
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	%	*26*	*41*	21	*5122 %*

Indikator Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran jasmani, serta pembudayaan pola hidup sehat di masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bidang olahraga karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berolahraga adalah keterbatasan waktu masyarakat akibat aktivitas pekerjaan maupun pendidikan, serta kurangnya variasi program olahraga masyarakat yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok usia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dalam mendorong minat masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Meskipun capaian indikator belum sepenuhnya

memenuhi target yang ditetapkan, berbagai kegiatan pembudayaan olahraga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat, pembinaan komunitas olahraga rekreasi, serta dukungan terhadap kegiatan olahraga yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga. Dengan implementasi berbagai strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga dapat meningkat secara bertahap pada tahun 2025, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Grafik. 3.3 Perbandingan antara Target & Realisasi Angka Partisipasi masyarakat berolahraga 2025

Berdasarkan data pada grafik, target Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga ditetapkan sebesar 41 persen, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 21 persen. Dengan demikian, tingkat capaian indikator tersebut berada pada kisaran 51,22 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan.

Selisih antara target dan realisasi sebesar 20 persen menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan olahraga. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas olahraga bagi kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang mudah

diakses oleh masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat yang bersifat masif dan berkelanjutan.

Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berolahraga adalah keterbatasan waktu masyarakat akibat aktivitas pekerjaan maupun pendidikan, serta kurangnya variasi program olahraga masyarakat yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok usia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dalam mendorong minat masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Dalam rangka mencapai target Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga pada tahun 2025 sebesar 41 persen, diperlukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan capaian indikator tersebut. Dengan realisasi yang baru mencapai 21 persen, masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 20 persen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga antara lain melalui peningkatan penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat secara rutin dan terstruktur, penguatan peran komunitas olahraga sebagai penggerak kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat, serta peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana olahraga publik.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan melalui berbagai media dan kegiatan edukasi masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi olahraga, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, serta sektor swasta, juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program pembudayaan olahraga.



Gambar 3.5 Kegiatan Pelajar dan Masyarakat Sumsel Bugar
Dispora Prov. Sumsel Tahun 2025

Kegiatan Pelajar dan Masyarakat Sumsel Bugar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu program strategis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan aktivitas olahraga secara teratur dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya pelajar dan masyarakat umum, untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik serta olahraga rekreasi, sekaligus sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang sehat, bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pembinaan olahraga masyarakat sejak usia pelajar sebagai bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, serta peningkatan kebugaran jasmani generasi muda.

Pelaksanaan kegiatan Pelajar dan Masyarakat Sumsel Bugar melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain pelajar dari berbagai satuan pendidikan, komunitas olahraga masyarakat, organisasi olahraga, serta masyarakat umum. Kegiatan ini dikemas dalam berbagai bentuk aktivitas olahraga rekreasi dan kebugaran yang bersifat partisipatif, edukatif, dan inklusif sehingga dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan kebugaran jasmani.

Selain sebagai sarana pembudayaan olahraga, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat interaksi sosial di tengah masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun budaya hidup sehat. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin termotivasi untuk melakukan aktivitas olahraga secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.

Ke depan, kegiatan Pelajar dan Masyarakat Sumsel Bugar diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan peserta yang lebih luas serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, program pembudayaan olahraga di Provinsi Sumatera

Selatan dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

B.5. Sasaran 5 : Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator : Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Medali yang diperoleh dari kejuaraan Nasional dan Internasional

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Jumlah Medali yang diperoleh dari kejuaraan Nasional dan Internasional	Medali	100	130	*171*	131.54%

Indikator jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga daerah. Capaian indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan program pembinaan atlet yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan, kompetisi, serta dukungan fasilitas dan pendampingan bagi atlet berprestasi. Perolehan medali yang melampaui target juga menunjukkan adanya peningkatan daya saing atlet daerah dalam berbagai ajang kompetisi. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pembinaan olahraga prestasi yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan sehingga mampu mempertahankan bahkan melampaui capaian yang telah diraih, serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan reputasi daerah pada berbagai ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025 dan periode berikutnya.



Grafik. 3.4 Perbandingan antara Target & Realisasi Jumlah Medali yang diperoleh dari kejuaraan Nasional dan Internasional 2025

Berdasarkan data pada grafik, target perolehan medali yang ditetapkan adalah sebanyak 130 medali, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai 171 medali. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 131,54 persen dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kinerja pembinaan olahraga prestasi telah melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan dan pengembangan atlet yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang positif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain peningkatan kualitas pembinaan atlet, intensitas latihan yang lebih terprogram, dukungan pelatih yang kompeten, serta partisipasi atlet dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, pelatih, serta para atlet turut berperan penting dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 130 medali, realisasi yang mencapai 171 medali menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target dengan selisih 41 medali. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan performa atlet serta keberhasilan strategi pembinaan olahraga prestasi yang telah dilaksanakan.

Meskipun target telah terlampaui, upaya peningkatan prestasi olahraga tetap perlu terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem pembinaan atlet sejak usia dini, meningkatkan kualitas pelatihan dan kompetisi, serta memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap kebutuhan atlet dan pelatih.

Selain itu, peningkatan partisipasi atlet dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional juga perlu terus didorong sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman bertanding serta mengukur kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan yang lebih luas.

Tabel 3.8 Perolehan Medali Internasional dan Nasional Dispora Prov. Sumsel Tahun 2025

	Kegiatan	Ket
1		Apresiasi Prestasi Atlet Sumsel di SEA GAMES Thailand 2025, meraih Medali Emas dan Perak Maryati, S.Pd., M.Pd, atlet asal Sumatera Selatan yang sukses mengharumkan nama bangsa dan daerah pada ajang SEA GAMES Thailand 2025.
2		Pemberian Bonus Atlet Pelajar Disabilitas Berprestasi Pada Ajang PEPARPENAS XI Tahun 2025, memberikan bonus kepada Atlet Pelajar Disabilitas berprestasi pada ajang PEPARPENAS XI
3		Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, Kejuaraan Nasional FORNASKORMI NTB Tahun 2025
4		Kejuaraan Atletik Pelajar Terbuka “Piala Ratu GKR Hemas Jogja Open” Tahun 2025

Pencapaian hasil yang luar biasa dan melebihi ekspektasi, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian yang lebih tinggi dari target agar bisa diterapkan di tahun-tahun berikutnya, mengupayakan agar kualitas pelatihan tetap tinggi dan bahkan meningkat untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan mendatang. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kualitas pelatihan yang baik, peningkatan pembinaan atlet, dan partisipasi yang aktif dalam berbagai kejuaraan. Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian, evaluasi yang mendalam dan penguatan aspek pendukung seperti pelatihan dan infrastruktur sangat penting.

B.6. Sasaran 6 : Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga

Indikator : Jumlah Pembinaan Atlet Muda

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Indikator Angka Jumlah Pembinaan Atlet Muda

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Jumlah Pembinaan Atlet Muda	org	262	*275*	*296*	107,6

Indikator kinerja Jumlah Pembinaan Atlet Muda merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya dalam menjaring serta mengembangkan potensi atlet usia muda. Pada tahun pelaporan, ditetapkan target pembinaan sebanyak 275 atlet muda. Program pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan klub olahraga, serta pembinaan atlet usia dini yang melibatkan pelatih, organisasi olahraga, dan pemangku kepentingan terkait.

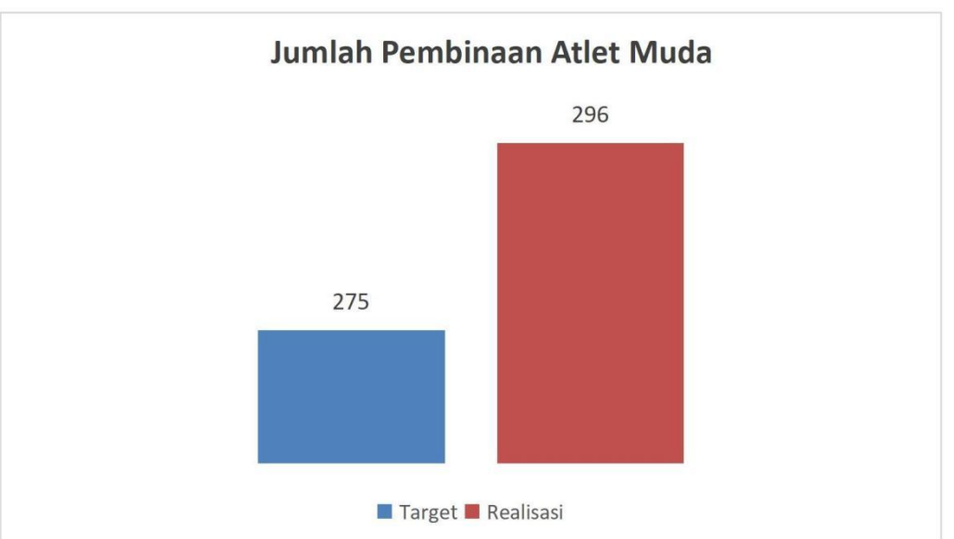
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi jumlah atlet muda yang mengikuti pembinaan mencapai 296 atlet, sehingga capaian kinerja mencapai 107,6% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan atlet muda berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang direncanakan. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, optimalisasi peran pelatih serta organisasi olahraga, serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembinaan olahraga.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan program pada tahun 2025, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang lebih optimal. Upaya penguatan sistem pembinaan yang telah dilakukan sejak

tahun 2025, seperti peningkatan koordinasi dengan organisasi olahraga, perluasan jangkauan pembinaan di tingkat sekolah dan klub olahraga, serta peningkatan kualitas pelatih, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah atlet muda yang terlibat dalam program pembinaan. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah pada masa mendatang.

Capaian pada tahun pelaporan yang berhasil melampaui target menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan sejak tahun 2025 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah partisipasi atlet muda dalam program pembinaan. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan lembaga pendidikan turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan.

Dengan capaian tersebut, diharapkan program pembinaan atlet muda pada tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi jumlah atlet yang dibina maupun kualitas pembinaan, sehingga mampu menghasilkan atlet-atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.



Grafik. 3.5 Perbandingan antara Target & Realisasi Jumlah Pembinaan Atlet Muda 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa indikator Jumlah Pembinaan Atlet Muda, pada tahun pelaporan ditetapkan target sebanyak 275 atlet yang mengikuti program pembinaan. Program pembinaan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan terstruktur, pembinaan klub/kelompok olahraga, serta dukungan pengembangan potensi atlet usia muda di berbagai cabang olahraga.

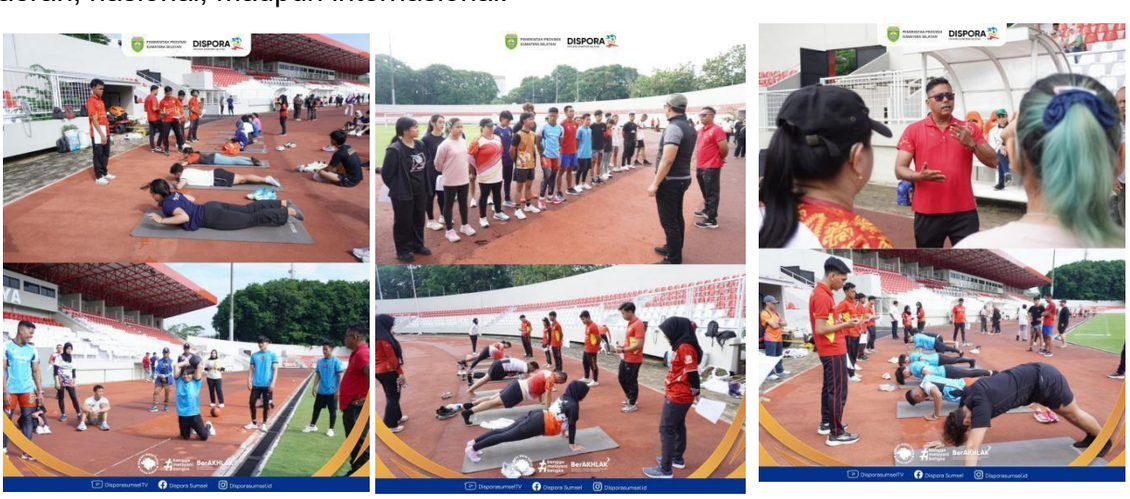
Realisasi capaian pada tahun tersebut menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 296 atlet muda yang berhasil dibina. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai

sekitar 107,6% dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan atlet muda berjalan dengan baik dan mendapat partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Keberhasilan melampaui target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya minat generasi muda terhadap kegiatan olahraga, optimalisasi peran pelatih dan organisasi olahraga, serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas dan program pembinaan olahraga usia dini.Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025, kinerja pembinaan atlet muda menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan kualitas pembinaan. Pada tahun 2025, program pembinaan difokuskan pada penguatan sistem pembinaan berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, serta perluasan jangkauan pembinaan di tingkat sekolah dan klub olahraga.

Capaian pada tahun pelaporan yang berhasil melampaui target menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan sejak tahun 2025 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah partisipasi atlet muda dalam program pembinaan. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan lembaga pendidikan turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan.

Dengan capaian tersebut, diharapkan program pembinaan atlet muda pada tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi jumlah atlet yang dibina maupun kualitas pembinaan, sehingga mampu menghasilkan atlet-atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.



Gambar 3.6 Kegiatan Seleksi Penerimaan Atlet SPOBNAS Cabor Taekwondo Dispora Prov. Sumsel Tahun 2025

Pelaksanaan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan penilaian, antara lain pengujian kemampuan teknik dasar, kondisi fisik, serta aspek disiplin dan kesiapan atlet dalam mengikuti program pembinaan.

Kegiatan ini diikuti oleh atlet-atlet taekwondo dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi atlet muda daerah untuk dapat berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

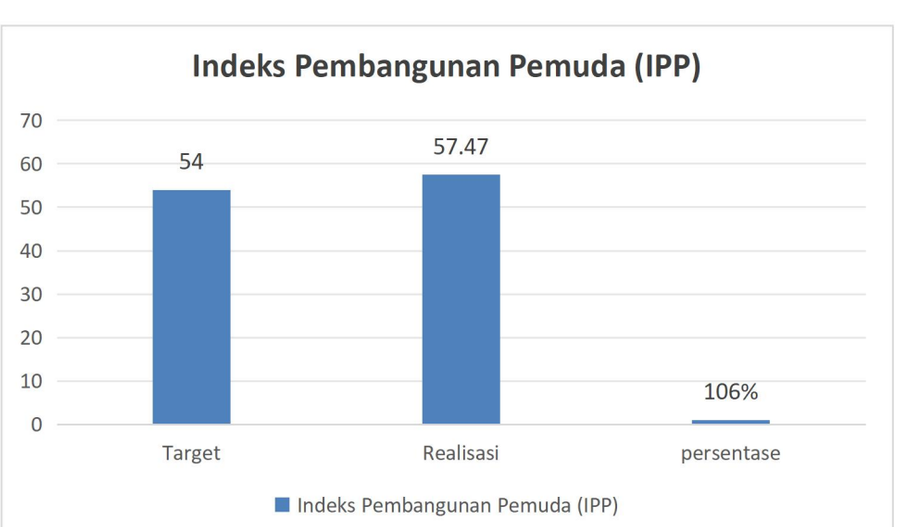
Melalui kegiatan seleksi ini diharapkan dapat terjaring atlet-atlet taekwondo yang berkualitas dan berpotensi untuk dibina lebih lanjut dalam program Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS). Dengan demikian, proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah maupun nasional di masa mendatang. Kegiatan Seleksi Penerimaan Atlet SPOBNAS Cabang Olahraga Taekwondo yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaring dan menyeleksi calon atlet potensial yang akan mengikuti program pembinaan olahraga berprestasi nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh atlet-atlet muda yang memiliki potensi, kemampuan teknik, serta kondisi fisik yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program pembinaan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

B.7. Sasaran 7 : Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga

Indikator : Indeks Pembangunan Pemuda

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	70	54	57,47	106%



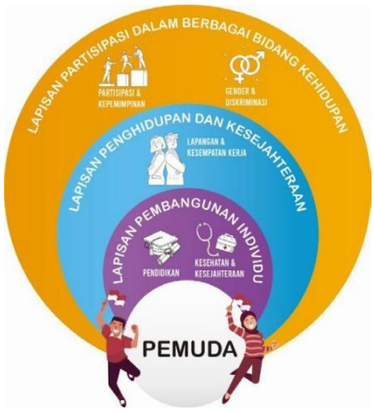
3.6 Grafik Perbandingan IPP Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan grafik capaian kinerja tahun 2025, target Indeks Pembangunan Pemuda yang ditetapkan adalah sebesar 54, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 57,47. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sekitar 99% dari target. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pemuda melalui berbagai program dan kegiatan kepemudaan telah berjalan secara efektif.

Keberhasilan capaian Indeks Pembangunan Pemuda ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, antara lain meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pelaksanaan program pemberdayaan pemuda, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penguatan peran organisasi kepemudaan di daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda.

Dengan capaian tersebut, diharapkan pembangunan kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang mampu berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya. Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber : Bapenas, BPS

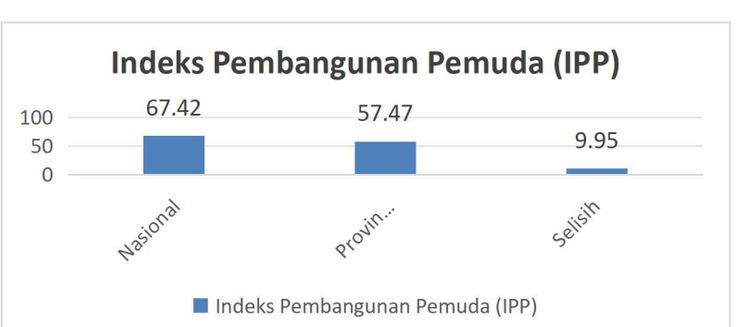
Gambar 3.7 Framework Pembangunan Pemuda

IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan.

Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat kemajuan pembangunan pemuda yang mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan serta peluang untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.11 Perbandingan Nilai IPP Nasional dan Provinsi

Uraian	Nasional	Provinsi Sumatera Selatan	Selisih	Status
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	**67,42**	**57,47**	**9,95**	Di bawah Nasional



Grafik Perbandingan IPP Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil sinkronisasi outcome prioritas pembangunan kepemudaan dan olahraga yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2025

serta target yang akan dicapai pada tahun 2027. Terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) serta Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan Nasional/Daerah yang Berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional.

Pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) nasional, capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 67,42 dengan yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 57,47. Capaian ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah capaian nasional. Terdapat selisih sebesar **9,95 poin** antara IPP Sumatera Selatan dan IPP Nasional, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan pemuda. Jika dibandingkan dengan nilai nasional, IPP Sumatera Selatan sekitar **14,76% lebih rendah**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Sumatera Selatan masih memerlukan perhatian dan penguatan, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta penguatan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang lebih terarah agar capaian IPP Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat dan secara bertahap mendekati atau melampaui capaian nasional.

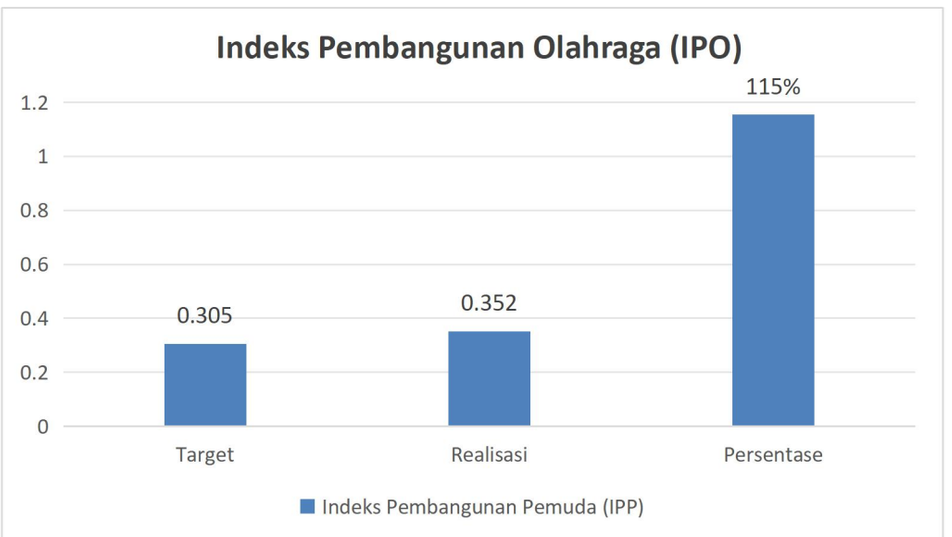
B.8 Sasaran 8 : Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga

Indikator : Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) / Sport Development Index (SDI)

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	2025		
			Target	Realisasi	%
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai Indeks	0,035	0,305	0,352	115%

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) / Sport Development Index (SDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan olahraga di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan kondisi pembangunan olahraga yang dilihat dari berbagai aspek seperti partisipasi masyarakat dalam olahraga, ketersediaan ruang terbuka olahraga, tingkat kebugaran masyarakat, serta ketersediaan sumber daya manusia di bidang olahraga.



Grafik. 3.7 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) / Sport Development Index (SDI)

Berdasarkan grafik capaian kinerja tahun 2025, target Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI) yang ditetapkan sebesar 0,035, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 0,352. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan olahraga telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, penyelenggaraan event olahraga daerah, pembinaan atlet, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

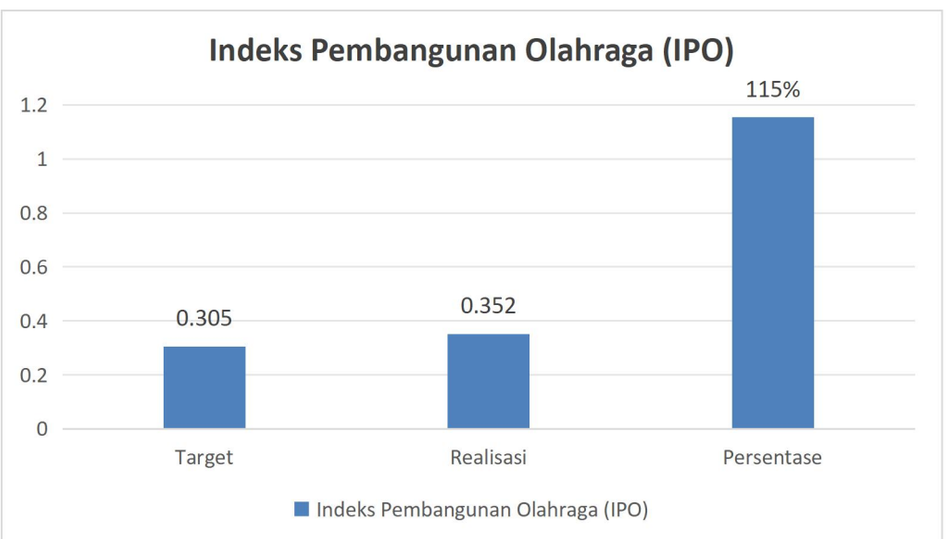
Capaian yang melebihi target ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan budaya olahraga di masyarakat, peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat, serta mendorong lahirnya prestasi olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Kedepan, pemerintah daerah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan program pembinaan olahraga, peningkatan kualitas fasilitas olahraga, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam aktivitas olahraga. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, target Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) / Sport Development Index (SDI) ditetapkan sebesar 0,035, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,352. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 115% dari target yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja telah melampaui target secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan olahraga daerah telah memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan nilai Indeks Pembangunan Olahraga. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan olahraga, terselenggaranya berbagai kegiatan pembinaan dan kompetisi olahraga di tingkat daerah, serta semakin optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Selain itu, dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, organisasi olahraga, maupun masyarakat, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian indikator tersebut. Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, ke depan diperlukan upaya untuk melakukan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan penetapan target kinerja agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi pembangunan olahraga secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan olahraga di daerah.

Tabel 3.13 Hasil IPO Nasional dan IPO Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Nasional	Provinsi Sumatera Selatan	Selisih	Status
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	**0,363**	**0,352**	**1%**	Di bawah Nasional



Grafik 3.8 Perbandingan IPO Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan

Nasional		0,589	0,551	0,568	0,583	0,334	0,347	0,012	0,124	0,162	0,363
No.	Provinsi	Literasi Fisik	Perkembangan Personal	Ekonomi	Kesehatan	Partisipasi	Kebugaran	Ruang Terbuka	Performa	SDM	IPO
1.	Aceh	0,619	0,580	0,523	0,611	0,427	0,473	0,096	0,062	0,259	0,406
2.	Sumatera Utara	0,634	0,560	0,558	0,582	0,345	0,218	0,019	0,110	0,157	0,354
3.	Sumatera Barat	0,575	0,542	0,557	0,555	0,319	0,321	0,008	0,093	0,242	0,357
4.	Riau	0,546	0,528	0,373	0,584	0,151	0,470	0,068	0,095	0,208	0,316
5.	Kepulauan Riau	0,600	0,553	0,380	0,590	0,229	0,336	0,007	0,023	0,154	0,319
6.	Jambi	0,630	0,569	0,634	0,591	0,335	0,244	0,010	0,048	0,206	0,363
7.	Bengkulu	0,596	0,563	0,754	0,591	0,234	0,439	0,012	0,007	0,244	0,382
8.	Kepulauan Bangka Belitung	0,605	0,541	0,735	0,564	0,566	0,691	0,020	0,027	0,217	0,451
9.	Sumatera Selatan	0,577	0,539	0,373	0,569	0,379	0,446	0,039	0,003	0,207	0,357
10.	Lampung	0,581	0,544	0,440	0,587	0,368	0,122	0,008	0,069	0,161	0,319
11.	Banten	0,579	0,536	0,437	0,554	0,306	0,466	0,005	0,113	0,125	0,343
12.	DKI Jakarta	0,706	0,548	0,782	0,591	0,565	0,638	0,014	1,000	0,125	0,556
13.	Jawa Barat	0,587	0,570	0,523	0,592	0,288	0,245	0,006	0,033	0,130	0,397
14.	Jawa Tengah	0,578	0,552	0,639	0,570	0,352	0,299	0,007	0,769	0,124	0,432
15.	DI Yogyakarta	0,584	0,572	0,513	0,578	0,358	0,362	0,019	0,189	0,175	0,372
16.	Jawa Timur	0,579	0,534	0,601	0,581	0,315	0,180	0,006	0,635	0,135	0,418
17.	Bali	0,574	0,561	0,662	0,584	0,515	0,466	0,013	0,149	0,197	0,413
18.	Nusa Tenggara Barat	0,594	0,572	0,490	0,612	0,393	0,452	0,013	0,060	0,252	0,382
19.	Nusa Tenggara Timur	0,560	0,543	0,416	0,583	0,287	0,365	0,015	0,039	0,287	0,344
20.	Kalimantan Barat	0,536	0,518	0,794	0,580	0,204	0,358	0,013	0,052	0,175	0,358
21.	Kalimantan Tengah	0,614	0,552	0,798	0,583	0,544	0,138	0,042	0,004	0,246	0,403
22.	Kalimantan Selatan	0,620	0,566	0,794	0,591	0,283	0,186	0,019	0,082	0,166	0,360
23.	Kalimantan Timur	0,567	0,537	0,618	0,572	0,359	0,178	0,020	0,129	0,199	0,353
24.	Kalimantan Utara	0,595	0,525	0,526	0,596	0,462	0,238	0,029	0,003	0,225	0,355
25.	Sulawesi Utara	0,584	0,545	0,670	0,587	0,417	0,187	0,015	0,035	0,182	0,358
26.	Gorontalo	0,520	0,577	0,320	0,585	0,169	0,381	0,015	0,022	0,227	0,313
27.	Sulawesi Tengah	0,633	0,552	0,625	0,587	0,245	0,467	0,020	0,025	0,248	0,378
28.	Sulawesi Barat	0,606	0,586	0,715	0,598	0,399	0,455	0,027	0,004	0,225	0,402
29.	Sulawesi Selatan	0,563	0,525	0,698	0,562	0,289	0,254	0,006	0,070	0,199	0,352
30.	Sulawesi Tenggara	0,631	0,549	0,628	0,603	0,374	0,497	0,002	0,014	0,258	0,395
31.	Maluku	0,569	0,497	0,688	0,587	0,281	0,258	0,002	0,015	0,219	0,346
32.	Maluku Utara	0,511	0,612	0,636	0,623	0,253	0,157	0,030	0,022	0,201	0,341
33.	Papua	0,103	0,874	0,525	0,893	0,210	0,490	0,101	0,050	0,170	0,442
34.	Papua Barat	0,620	0,523	0,796	0,582	0,433	0,186	0,023	0,000	0,180	0,387
35.	Papua Barat Daya	0,574	0,532	0,607	0,561	0,422	0,476	0,010	0,005	0,212	0,378
36.	Papua Tengah	0,632	0,558	0,828	0,622	0,337	0,460	0,035	0,000	0,057	0,362
37.	Papua Pegunungan	0,501	0,461	0,000	0,471	0,093	0,328	0,016	0,002	0,036	0,212
38.	Papua Selatan	0,590	0,552	0,588	0,584	0,334	0,148	0,029	0,003	0,167	0,353

Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Olahraga Sumsel Tahun 2025

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan olahraga di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, antara lain ketersediaan ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia keolahragaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, tingkat kebugaran jasmani masyarakat, serta perkembangan literasi fisik.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel, nilai Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) tingkat nasional tercatat sebesar 0,363. Nilai tersebut merupakan hasil komposit dari berbagai dimensi pembangunan olahraga yang diukur di seluruh provinsi di Indonesia. Tabel tersebut juga menunjukkan perbandingan nilai indeks pembangunan olahraga di setiap provinsi, yang menggambarkan tingkat perkembangan pembangunan olahraga yang berbeda-beda antar daerah. Perbedaan nilai indeks tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga.

Beberapa provinsi menunjukkan capaian indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yang mengindikasikan bahwa pembangunan olahraga di wilayah tersebut telah berjalan lebih baik, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, program pembinaan olahraga, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Sementara itu, terdapat pula provinsi

dengan nilai indeks yang relatif lebih rendah, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya dalam pengembangan olahraga, khususnya dalam penyediaan fasilitas olahraga, peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, serta peningkatan budaya olahraga di masyarakat.

Secara umum, data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan olahraga secara nasional serta menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan olahraga yang lebih terarah. Melalui pemanfaatan data indeks pembangunan olahraga ini, diharapkan dapat dilakukan upaya peningkatan pembangunan olahraga secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, dan berprestasi.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) yang ditampilkan pada tabel, diketahui bahwa nilai indeks pembangunan olahraga tingkat nasional tercatat sebesar 0,363. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran komposit dari berbagai dimensi pembangunan olahraga yang meliputi ketersediaan ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia olahraga, tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga, tingkat kebugaran jasmani masyarakat, serta literasi fisik.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks di tingkat provinsi, terlihat adanya variasi capaian antar daerah. Beberapa provinsi menunjukkan nilai indeks yang berada di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa pembangunan olahraga di wilayah tersebut telah berkembang dengan cukup baik. Hal ini umumnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan olahraga, serta dukungan program pembinaan olahraga yang berkelanjutan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa provinsi dengan nilai indeks yang berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam aspek peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia olahraga, serta peningkatan budaya olahraga di masyarakat. Perbandingan capaian indeks antar provinsi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan pembangunan olahraga di

Indonesia. Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan olahraga yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan strategi peningkatan pembangunan olahraga pada periode berikutnya.

Dengan demikian, analisis terhadap posisi capaian indeks pembangunan olahraga di tingkat provinsi terhadap rata-rata nasional menjadi penting sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan olahraga serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan terarah guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan olahraga secara berkelanjutan. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan beberapa dimensi utama yang menggambarkan kondisi pembangunan olahraga secara menyeluruh. Dimensi tersebut meliputi ketersediaan ruang terbuka olahraga (Open Space), sumber daya manusia olahraga (SDM), tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga, tingkat kebugaran jasmani masyarakat, serta literasi fisik (physical literacy). Masing-masing dimensi memberikan gambaran mengenai aspek tertentu dari pembangunan olahraga yang saling berkaitan.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realiasi belanja pada Realisasi Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
I	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	***23.085.481.691***	***20.173.559.893***	***96,79***
I.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**583.000.000**	**454.073.478**	**94,80**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	303.000.000	177.920.178	90,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	280.000.000	276.153.300	100,00
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.669.455.672**	**12.257.677.243**	**99,98**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.077.455.672	11.696.471.485	100,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	543.000.000	517.550.000	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.500.000	21.374.685	90,00

6	Penyusunan Pelaporan dan Anallisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.500.000	22.281.073	100,00
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**309.250.000**	**308.626.824**	**100,00**
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000	299.947.023	100,00
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.250.000	8.679.801	100,00
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**528.098.328**	**362.359.780**	**96,10**
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	232.000.000	225.500.385	100,00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	33.622.500	100,00
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	49.936.794	100,00
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	206.098.328	53.300.101	90,00
I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**902.250.000**	**865.573.747**	**99,22**
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor	30.000.000	29.926.000	100,00

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	59.772.412	100,00
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	59.661.000	100,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	118.353.400	100,00
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	47.783.700	100,00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	14.750.000	90,00
19	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	36.977.190	90,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.500.000	400.336.935	100,00
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.750.000	18.213.110	100,00
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.000.000	79.800.000	100,00
I.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.000.000**	**248.840.000**	**100,00**
23	Pengadaan Mebel	-	-	0,00
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	248.840.000	100,00

I.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.441.435.566**	**3.716.698.616**	**90,02**
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	1.005.192.916	90,00
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.131.435.566	2.701.505.700	90,00
I.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.401.992.125**	**1.959.710.205**	**90,13**
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.876.800	229.108.200	90,00
29	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	980.000	100,00
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	29.500.000	100,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.975.615.325	1.700.122.005	90,00
II	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***	***7.792.274.741***	***7.679.415.629***	***100,00***

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
II.1	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**7.532.300.741**	**7.460.378.122**	**100,00**
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	5.980.247.269	5.993.993.561	100,00
33	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	176.595.000	174.659.551	100,00
34	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	368.245.450	353.541.339	100,00
35	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	142.260.000	135.706.263	100,00

36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi	192.913.300	164.172.161	100,00
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	114.192.800	110.074.369	100,00
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	557.846.922	528.230.878	100,00
II.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**259.974.000**	**219.037.507**	**100,00**
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi	259.974.000	219.037.507	100,00
III	***Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan***	***83.340.895.109***	***81.317.633.031***	***99,53***
No.	**Program /Kegiatan**	**Anggaran**	**Realisasi Keuangan**	**Fisik**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
III.1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**4.757.392.196**	**3.970.311.380**	**92,41**
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.904.024.403	2.262.187.995	90,00
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	706.300.000	572.644.713	90,00
42	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	1.147.067.793	1.135.478.672	100,00

III.2	**Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga**	**27.773.622.254**	**26.843.080.905**	**100,00**
43	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalamPenyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	7.700.842.500	7.611.808.723	100,00
44	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan OlahragaTingkat Nasional dan Provinsi	20.072.779.754	19.231.272.182	100,00
III.3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**23.520.643.466**	**23.340.399.895**	**99,87**
45	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	23.219.461.438	23.196.796.266	100,00
46	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-	-	0,00
47	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	301.182.028	143.603.629	90,00
III.4	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**27.289.237.193**	**27.163.840.851**	**100,00**

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5
48	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.289.237.193	27.163.840.851	100,00
IV	***Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan***	***3.985.670.000***	***3.979.501.100***	***100,00***
IV.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**3.985.670.000**	**3.979.501.100**	**100,00**
49	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	3.985.670.000	3.979.501.100	100,00
	Jumlah : 49 kegiatan	**118.204.321.541**	**113.150.109.653**	**99,04**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator kinerja daerah yang diambil dari indikator kinerja sasaran dan penyelenggaraan program kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelaksanaan pada tahun pertama dari Rencana Strategis 2024-2026. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 berada di dalam penilaian berkinerja **sangat baik** dengan persentase rata-rata **209,92%**.

Peningkatan kualitas capaian kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kinerja secara berkelanjutan. Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi penyelarasan target dan indikator kinerja dengan RPJMD serta Renstra, penetapan target yang realistis dan terukur, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan validitas dan akurasi data melalui pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang. Terhadap capaian yang telah melampaui target, perlu dilakukan analisis untuk memastikan bahwa tingginya realisasi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas dan manfaat program, sedangkan indikator yang belum mencapai target perlu dianalisis akar permasalahannya dan segera disusun langkah percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan koordinasi antar bidang, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kepemudaan dan olahraga, serta pemangku kepentingan lainnya, yang disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi harus menjadi dasar perbaikan rencana aksi, penetapan target pada tahun berikutnya, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih berkualitas dan berbasis hasil. Dengan langkah tersebut, capaian kinerja sebesar **209,92%** dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitasnya agar tidak hanya menunjukkan keberhasilan secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Telah melakukan perbaikan target kinerja agar yang selaras dengan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Monitoring target kinerja dan rencana aksi secara berkala.
- Pengukuran setiap indikator kinerja telah dilakukakan secara berjenjang.
- Capaian kinerja meningkat dari 147% di tahun 2025 menjadi 209,92%.